

## ABSTRAK

Di Kabupaten Tasikmalaya banyak angkutan travel ilegal. Pada tahun 2022 dengan banyaknya travel ilegal yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ratusan pengemudi elf melakukan mogok untuk beroperasi dan demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dibutuhkan Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan darat sebagai payung hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini membutuhkan pengamatan langsung tentang subjek dan objeknya, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini ialah ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Koordinator Rapat Pansus Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), dan Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Teori yang digunakan ialah teori aktor kebijakan publik untuk memahami dinamika interaksi, pengaruh, dan peran masing-masing aktor dalam mempengaruhi hasil kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), tahap penyusunan mencakup pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan oleh eksekutif serta legislatif, sedangkan tahap pembahasan dilakukan melalui mekanisme rapat Panitia Khusus (Pansus). Ketiga tahapan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antaraktor kebijakan, yaitu legislatif, eksekutif, dan pihak-pihak terkait, dalam menghasilkan regulasi yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi di tingkat daerah serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Penyelenggaraan Perhubungan, Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah.

## ABSTRACT

*In Tasikmalaya district there are many illegal travel vehicles. In 2022, with the large number of illegal travelers in the Tasikmalaya Regency area, hundreds of elf drivers will go on strike to operate and demonstrate at the Tasikmalaya Regency Transportation and Communications and Information Service office. So a Draft Regional Regulation is needed regarding the implementation of land transportation as a legal umbrella to overcome this problem. This research aims to analyze the process of forming the Draft Regional Regulation (Raperda) concerning the Implementation of Land Transportation in Tasikmalaya Regency.*

*This research uses qualitative research methods because this research requires direct observation of the subject and object, data is collected through in-depth interviews, observation and documentation studies. The subjects of this research are the chairman of Commission III of the Tasikmalaya Regency DPRD, the Deputy Chair of the Tasikmalaya Regency DPRD as well as the Coordinator of the Special Committee Meeting for the Draft Regional Regulation on the Implementation of Land Transportation, the Tasikmalaya Regency Transportation, Communication and Information Service, the Land Transport Organization (ORGANDA), and the Head of the Legal Subdivision of the Tasikmalaya Regency Regional Secretariat. . The theory used is public policy actor theory to understand the dynamics of interaction, influence and the role of each actor in influencing policy outcomes.*

*The research results show that the process of forming Draft Regional Regulations is carried out through three main stages. The planning stage begins with the preparation of the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), the preparation stage includes the creation of academic texts and draft regulations by the executive and legislative, while the discussion stage is carried out through the Special Committee (Pansus) meeting mechanism. These three stages show the importance of coordination between policy actors, namely the legislature, executive and related parties, in producing regulations that are effective and meet the needs of society. It is hoped that this research can provide an in-depth understanding of the legislative process at the regional level and become a reference for developing better public policies.*

**Keywords:** *Transportation Management, Draft Regional Regulations, Regional Regulations.*